

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) OLEH BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO

Andri Hanafi¹, Lisda Van Gobel², Luthfia Bakari³

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

hanafiandri655@gmail.com

Received: 08-07-2025

Revised: 20-08-2025

Approved: 30-08-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo terhadap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Fokus utama dalam penelitian ini mencakup tiga aspek, yaitu frekuensi dan intensitas pengawasan, komunikasi, serta kerja sama antara pengawas dan pengelola PKBM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap PKBM belum berjalan secara optimal. Pengawasan masih bersifat insidental dan belum terjadwal secara sistematis, sehingga tidak semua PKBM mendapatkan pendampingan yang merata. Komunikasi antara pihak PNF dan pengelola PKBM juga masih terbatas dan kurang terstruktur, yang menyebabkan kesenjangan informasi serta miskomunikasi dalam pelaksanaan program. Selain itu, kerja sama antara kedua pihak masih bersifat administratif dan belum menyentuh kolaborasi strategis yang dapat mendorong inovasi dan pengembangan lembaga PKBM secara berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PNF meningkatkan kualitas pengawasan dengan jadwal yang lebih teratur, membangun sistem komunikasi yang terbuka dan responsif, serta menciptakan pola kerja sama partisipatif guna memperkuat peran PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal yang adaptif dan berkualitas.

Kata Kunci: *Pengawasan, PKBM, PNF, Dinas Pendidikan, Komunikasi, Kerja Sama*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran krusial dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Keberadaan sistem pendidikan yang berkesinambungan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional di setiap negara. Pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan merupakan tonggak utama dalam membentuk karakter dan kecerdasan suatu bangsa. Ketika sektor pendidikan mengalami peningkatan, maka kualitas masyarakat di dalamnya pun turut meningkat. Untuk menciptakan masyarakat yang mampu berkontribusi dalam pembangunan, diperlukan langkah konkret dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia. Salah satu cara strategis dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia adalah dengan memperluas akses serta memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya dilakukan dalam sekolah (formal), namun juga dalam lingkup keluarga, lingkungan sekitar (informal) dan dalam pendidikan nonformal. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi. Pada Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

Salah satu lembaga yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan berbagai program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan warga belajar di wilayah sekitarnya. Berbagai jenis program yang dilaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mencakup antara lain keaksaraan fungsional, pendidikan setara tingkat SD, SMP, hingga SMA, pelatihan keahlian kerja, pembelajaran kecakapan hidup, layanan pendidikan untuk anak usia dini, pengembangan pendidikan bagi pemuda, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, serta pelatihan keterampilan lainnya. Selain itu, diselenggarakan pula program keaksaraan dan pendidikan nonformal lainnya yang dibutuhkan oleh warga sesuai dengan kebutuhan lokal (PP No. 17 Tahun 2010, Pasal 105 Ayat 2). Salah satu layanan utama dalam jalur pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan, yang terbagi menjadi beberapa program belajar seperti Paket A (setara SD/MI), Paket B (setara SMP/MTs), dan Paket C (setara SMA/MA). Program-program ini diselenggarakan oleh PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lain yang serupa, dengan sasaran utama kelompok masyarakat yang tidak dapat melanjutkan sekolah formal karena kendala finansial.

Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) lahir sebagai inisiatif yang tumbuh dari partisipasi masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan ditujukan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri. Secara garis besar, keberadaan PKBM bertujuan untuk memberikan akses belajar yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta membentuk sikap mental yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kesiapan dalam dunia kerja. Keberadaan PKBM menjadi strategis dalam mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan literasi, dan mendukung program pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, efektivitas penyelenggaraan PKBM sangat bergantung pada pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan PKBM agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi kualitas layanan, manajemen, maupun keberlanjutan program.

Pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan melalui bidang PNF merupakan komponen krusial dalam manajemen pendidikan yang memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan ini mencakup aktivitas mengawasi, memeriksa, dan mengendalikan kegiatan agar sejalan dengan rencana dan menghasilkan output yang diharapkan.

Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan, pemerintah tidak hanya mengandalkan jalur pendidikan formal, tetapi juga mengembangkan pendidikan nonformal sebagai alternatif dan pelengkap pendidikan formal. Salah satu lembaga pendidikan nonformal yang memiliki peran strategis adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM hadir sebagai wadah belajar masyarakat yang menyelenggarakan berbagai program pendidikan, mulai dari pendidikan keaksaraan, kesetaraan, keterampilan kerja, hingga pemberdayaan masyarakat. Keberadaan PKBM sangat penting, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan PKBM sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan pengawasannya.

Berikut data Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dibawah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Bidang Pendidikan Nonformal (PNF):

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap serta menjelaskan bagaimana pelaksanaan standar dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan yang diterapkan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wilayah Sumatera Selatan, khususnya pada PKBM Bukit Sulap yang berlokasi di Kota Lubuk Linggau. Standar yang dijadikan acuan dalam program ini merujuk pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan, meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, serta (8) Standar Penilaian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, pengamatan langsung di lapangan, dan pengumpulan dokumen terkait. Proses analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian informasi, serta penarikan simpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sebagai metode validasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKBM Bukit Sulap pada umumnya telah melaksanakan sebagian besar aspek yang tercakup dalam delapan standar penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar penyelenggaraan program di PKBM ini sudah berjalan dengan cukup baik, sebagaimana dibuktikan melalui pemenuhan berbagai indikator pada masing-masing standar. Ke depan, diharapkan para pengelola dapat lebih memahami dan menerapkan standar penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan secara lebih menyeluruh, mengingat pentingnya hal tersebut dalam menjamin kualitas layanan pendidikan nonformal agar semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Irmawati, 2017) dengan judul **“Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Mengurangi Buta Aksara Di Kabupaten Karimun”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan: 1) kondisi masyarakat di Kabupaten Karimun berdasarkan jenis pekerjaan mereka; 2) pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan; serta 3) kontribusi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam menekan angka buta huruf. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan warga belajar, tokoh masyarakat, serta staf Dinas Pendidikan, dilengkapi dengan diskusi kelompok terarah. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa 1) mayoritas penduduk Kabupaten Karimun bekerja sebagai buruh, nelayan, penyelam, pedagang, atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan memanfaatkan paspor wisata yang tidak memerlukan ijazah pendidikan formal. Sebagian kecil lainnya adalah pegawai negeri sipil. 2) Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih tergolong rendah, karena banyak dari mereka yang merasa mampu memperoleh penghasilan cukup besar tanpa perlu mengenyam pendidikan formal. 3) Keberadaan PKBM di wilayah ini memainkan peran vital dalam menanggulangi buta aksara, terbukti dari banyaknya peserta dewasa yang aktif dalam program keaksaraan seperti Paket A, B, dan C, serta program keaksaraan usaha

mandiri. Anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan kelompok bermain dan pendidikan anak usia dini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa PKBM memegang peranan penting dalam menurunkan tingkat buta aksara di Kabupaten Karimun, terutama karena fleksibilitas waktu belajar yang ditawarkan lebih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dibandingkan pendidikan formal. Namun demikian, pelaksanaan program PKBM masih menghadapi sejumlah kendala seperti jam kerja masyarakat yang tidak menentu, jarak tempuh yang jauh dan sulit dijangkau, terbatasnya jumlah tutor, serta rendahnya honor yang diterima para tutor.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait proses pengelolaan di PKBM Bina Sejahtera serta mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilannya. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai kerangka analisis utama. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari lima orang, yakni satu orang pengelola sebagai informan utama, serta beberapa narasumber tambahan yang memberikan informasi pendukung, yaitu satu tutor, dua warga belajar, dan satu orang tua dari peserta belajar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam (indepth interview), serta dokumentasi sebagai alat pelengkap.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Sub Fokus Penelitian / Indikator	Hasil Penelitian
1	(Hakim et al., 2020) STUDI IMPLEMENTASI STANDAR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI SUMATERA SELATAN.	Deskriptif Kualitatif.	Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan di PKBM Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau.	Hasil dari temuan penelitian menunjukkan bahwa PKBM Bukit Sulap pada umumnya telah melaksanakan sebagian besar aspek yang tercakup dalam delapan standar penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar penyelenggaraan program di PKBM ini sudah berjalan dengan cukup baik, sebagaimana dibuktikan melalui pemenuhan berbagai indikator pada masing-masing standar. Ke depan, diharapkan para pengelola dapat lebih memahami dan menerapkan standar penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan secara lebih menyeluruh, mengingat pentingnya hal tersebut dalam menjamin kualitas layanan pendidikan nonformal agar semakin baik.
2	(Irmawati, 2017) Peran Pusat Kegiatan Belajar	Deskriptif Kualitatif.	Peran pemerintah	Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa 1) mayoritas penduduk

No	Nama Dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Sub Fokus Penelitian / Indikator	Hasil Penelitian
	Masyarakat (PKBM) Dalam Mengurangi Buta Aksara Di Kabupaten Karimun.		dalam mengurangi buta aksara.	Kabupaten Karimun bekerja sebagai buruh, nelayan, penyelam, pedagang, atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan memanfaatkan paspor wisata yang tidak memerlukan ijazah pendidikan formal. Sebagian kecil lainnya adalah pegawai negeri sipil. 2) Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih tergolong rendah, karena banyak dari mereka yang merasa mampu memperoleh penghasilan cukup besar tanpa perlu mengenyam pendidikan formal. 3) Keberadaan PKBM di wilayah ini memainkan peran vital dalam menanggulangi buta aksara, terbukti dari banyaknya peserta dewasa yang aktif dalam program keaksaraan seperti Paket A, B, dan C, serta program keaksaraan usaha mandiri.
3	(Hoerniasih, 2017) FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENGELOLAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “BINA SEJAHTERA “DESA PINAYUNGAN KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG.	Deskriptif Kualitatif.	pengelolaan PKBM Bina Sejahtera untuk mengetahui faktor pendukung keberhasilan pengelolaan PKBM Bina Sejahtera.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen PKBM Bina Sejahtera dilaksanakan melalui serangkaian tahapan manajerial, meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan atau pemberian motivasi (motivating), pembinaan (comforming), evaluasi (evaluating), dan pengembangan (developing). Keberhasilan dalam pengelolaan lembaga ini didukung oleh dua jenis faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor kunci yang paling menentukan adalah adanya pemahaman yang kuat dari pihak pengelola terhadap tugas pokok dan fungsinya, serta kemampuan mengikuti mekanisme pengelolaan yang sesuai dengan Standar Minimal Manajemen.

Berdasarkan tabel Mapping penelitian-penelitian di atas dapat ditarik persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut, persamaannya adalah ketiga penelitian di atas menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dan perbedaannya terletak pada tempat yang berbeda dan fokus yang berbeda.

Konsep Administrasi Publik

Soewarno Handayani (Mulyah, 2020) mengungkapkan bahwa administrasi yaitu catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Sondang P. Siagian (Risdayani Pandiangan, 2015) mengatakan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dimock dan Dimock (Marliani, 2018) mengatakan bahwa administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki oleh masyarakat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya.

Pengertian Administrasi Publik

Chander dan Plano (Sry Arlina, 2020) menjelaskan Administrasi publik dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengorganisasian serta pengoordinasian sumber daya dan aparatur negara, yang bertujuan untuk merumuskan, menjalankan, serta mengelola berbagai keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Yeremias Keban (Sry Arlina, 2020) Administrasi Publik menggambarkan peran pemerintah sebagai satu-satunya otoritas yang dominan atau sebagai pengatur utama, yang secara aktif mengambil inisiatif dalam menetapkan aturan serta merancang kebijakan. Pemerintah dianggap bertindak atas dasar penilaian sendiri mengenai apa yang dianggap penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Pandangan ini muncul dari asumsi bahwa masyarakat bersifat pasif, memiliki keterbatasan dalam bertindak, dan karenanya harus mengikuti serta menerima segala bentuk keputusan dan pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

L D White (Veronika, 2021) menjelaskan bahwa administrasi public terdiri atas semua operasi yang bertujuan guna memenuhi atau menegakkan kebijakan publik.

Dimensi Administrasi Publik

Menurut Yeremias Keban (Putri et al., 2022) administrasi publik memiliki enam dimensi strategis yang sangat penting untuk mencapai tujuan, yaitu:

- 1 Dimensi kebijakan melibatkan proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan serta metode atau alternatif terbaik untuk mencapainya.
- 2 Dimensi struktur organisasi berkaitan dengan pengaturan struktur, termasuk pembentukan unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik), serta penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk meraih sasaran atau tujuan dan terget.
- 3 Dimensi manajemen meliputi bagaimana kegiatan yang direncanakan dapat diimplementasikan (diaktifkan, diorganisir, dan dikontrol) sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
- 4 Dimensi etika berfokus pada tuntutan moral terhadap administrasi mengenai hal apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk.
- 5 Dimensi lingkungan menggambarkan suasana dan kondisi sekitar yang memengaruhi semua aspek seperti struktur organisasi manajerial, kebijakan, dan kewajiban.
- 6 Dimensi kinerja memberikan bukti konkret mengenai keberadaan dan efektivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi publik di suatu negara.

2.3 Konsep Manajemen

Menurut Luther Gulick (Fakiha, 2021) Manajemen merupakan disiplin ilmu yang secara terstruktur berupaya menjelaskan alasan dan cara manusia berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama yang memberikan nilai dan manfaat bagi kehidupan manusia.

Dalam pelaksanaannya, manajemen berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Henri Fayol (Mariska & Sukiyah, 2023) beberapa prinsip tersebut antara lain adalah pembagian tugas, wewenang, disiplin, kesatuan komando, dan kesatuan dalam pengarahan. Prinsip-prinsip memberikan pedoman agar manajemen dapat dijalankan secara adil, terstruktur, dan berorientasi pada hasil.

Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya tantangan global, manajemen tidak lagi hanya berfokus pada proses internal organisasi, tetapi juga mencakup bagaimana organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Faktor eksternal seperti perubahan teknologi, dinamika sosial, regulasi pemerintah, serta kompetisi pasar menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Menurut (Robbins & Coulter, 2020) manajemen modern harus mampu merespons perubahan lingkungan secara cepat dan tepat, sebab kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung pada kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika eksternal tersebut. Oleh karena itu, manajer dituntut memiliki kemampuan analisis situasi yang tajam serta kepekaan terhadap perubahan lingkungan agar strategi organisasi tetap relevan dan kompetitif.

Dalam praktiknya, efektivitas manajemen juga sangat ditentukan oleh keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Komunikasi yang terbuka dan dua arah akan menciptakan suasana kerja yang sehat, mendorong partisipasi aktif, serta meminimalisasi konflik yang mungkin terjadi. Menurut (Jones & George, 2018) menyatakan bahwa manajer yang efektif adalah mereka yang mampu menciptakan komunikasi interpersonal yang baik dan membangun kepercayaan di antara anggota tim. Selain itu, kepemimpinan yang bersifat partisipatif dan transformasional terbukti mampu meningkatkan kinerja individu maupun tim karena menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pencapaian tujuan organisasi. Manajer tidak lagi dilihat sebagai pemegang otoritas tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan pembimbing bagi tim yang dipimpinnya.

Menurut (Daft, 2021) manajemen berbasis informasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Data yang akurat dan terintegrasi membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih rasional dan berbasis pada bukti. Oleh karena itu, penguasaan teknologi menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh manajer masa kini.

Manajemen yang efektif adalah manajemen yang juga memperhatikan aspek moral dan tanggung jawab sosial. Praktik manajemen yang etis mencerminkan komitmen organisasi terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Hal ini penting agar organisasi memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan menciptakan reputasi positif dalam jangka panjang (Stoner et al., 2019).

Menurut (Koontz & Weihrich, 2016) manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dan mengoordinasikan sumber daya agar dapat bekerja secara efisien dan produktif. Dengan kombinasi tersebut, organisasi akan mampu bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Konsep Pengawasan

Menurut M. Manullang (Si Manis, 2023) Pengawasan merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu pekerjaan telah diselesaikan, mengevaluasi hasilnya, serta melakukan perbaikan jika dibutuhkan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sejak awal.

pengawasan harus dilakukan secara sistematis dan objektif agar tidak menimbulkan tekanan psikologis yang merugikan, namun justru mampu memotivasi individu untuk bekerja lebih baik dan profesional (Siagian, 2016).

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong lahirnya model pengawasan yang lebih modern dan efisien. Sistem digital seperti aplikasi pemantauan kinerja, database laporan kegiatan, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis data pengawasan, telah membuka ruang baru dalam praktik pengawasan yang lebih cepat, akurat, dan real-time. Menurut (Anthony & Govindarajan, 2020) pengawasan berbasis sistem informasi manajemen dapat meningkatkan akuntabilitas dan mempercepat pengambilan keputusan karena data yang dihasilkan lebih transparan dan mudah diakses.

Konsep Pengawasan Pendidikan NonFormal (PNF)

Menurut Suryadi, 2019 pengawasan pendidikan nonformal idealnya dilakukan dengan prinsip kemitraan, pembinaan, dan pemberdayaan, bukan hanya bersifat kontrol atau audit semata. Tujuannya adalah mendorong lembaga-lembaga PNF untuk berkembang secara mandiri namun tetap sesuai dengan arah kebijakan pendidikan nasional.

Konsep Pengawasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Menurut Sihombing (YANI, 2023) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah wadah pendidikan yang lahir dari prakarsa masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dianggap sebagai “pusat” dimana anggota masyarakat dari dekat dan jauh berpartisipasi dengan PKBM dalam program pendidikan sepulang sekolah yang memenuhi kebutuhan belajar mereka. Secara umum program pendidikan ekstrakurikuler yang dikelola oleh PKBM beragam dan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Program literasi seperti: Program literasi fungsional dan tindak lanjutnya berupa taman baca masyarakat.
2. Program peningkatan pendapatan seperti Program Kelompok Belajar Bisnis (KBU).
3. Program setara seperti Program Kelompok Belajar Paket A untuk SD, Program Kelompok Belajar Paket B untuk SMP dan Kelompok Belajar Paket C adalah setara dengan SMA.

Agar program-program PKBM dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan pendirian lembaga, maka diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap PKBM tidak hanya menasar pada keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga mencakup aspek tata kelola lembaga, perencanaan program, kualitas sumber daya manusia, hingga pengelolaan anggaran. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas lembaga sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab publik terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Proses pengawasan PKBM idealnya dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas, seperti Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), serta dapat melibatkan unsur masyarakat atau mitra lembaga yang relevan. Pengawasan tidak hanya dilakukan dalam bentuk audit administratif, tetapi juga melalui pembinaan langsung,

monitoring lapangan, dan evaluasi terhadap hasil kegiatan. Menurut (Wiyani, 2020) pendekatan pengawasan yang berbasis pendampingan dan partisipasi aktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan mutu PKBM dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan pada kepatuhan administratif.

Konsep Peran Bidang Pendidikan NonFormal (PNF)

Peran bidang Pendidikan Nonformal (PNF) tidak hanya terbatas pada pelaksanaan program, tetapi juga mencakup perencanaan strategis dan pengembangan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat. Bidang ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan lembaga pelaksana pendidikan nonformal di tingkat daerah, khususnya dalam menyosialisasikan regulasi, mengalokasikan anggaran, serta memberikan pelatihan dan fasilitasi teknis kepada lembaga-lembaga seperti PKBM, LKP, dan organisasi masyarakat.

Selain itu, bidang PNF juga berperan sebagai penggerak sinergi antar sektor, baik dengan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, maupun instansi pemerintahan lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memperkuat program-program pemberdayaan berbasis pendidikan, seperti pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, atau program literasi digital yang dibutuhkan dalam era transformasi teknologi. Integrasi pendidikan nonformal dengan program pembangunan daerah dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing tinggi (Sutikno, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Nanda, 2024) Pendekatan kualitatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam konteks sosial secara alami. Penelitian ini menitikberatkan pada proses interaksi dan komunikasi yang intens antara peneliti dan objek kajian guna menggali makna dari fenomena tersebut secara menyeluruh. Sementara itu menurut (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2021) Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, sementara analisisnya menggunakan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap makna suatu fenomena daripada sekadar menarik kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi.

Sumber Data

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan dan penyelenggaraan PKBM. Data ini melibatkan wawancara mendalam dengan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tiga pengelola bidang PNF, tiga pengelola PKBM. Jadi jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, serta data statistik terkait PKBM yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun lembaga statistik lainnya. Dokumen kebijakan seperti peraturan pemerintah, pedoman teknis pengawasan PKBM, dan laporan hasil evaluasi menjadi rujukan penting untuk memahami konteks kebijakan dan pelaksanaan pengawasan.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau subjek dalam suatu situasi atau aktivitas tertentu. Tujuan observasi adalah untuk memahami perilaku, kejadian, atau kondisi sebagaimana adanya, tanpa harus mengandalkan pendapat atau interpretasi subjek yang diamati.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mendapatkan informasi atau data terkait topik tertentu. Wawancara memungkinkan peneliti menggali pendapat, persepsi, atau pengalaman mendalam dari responden yang sulit diperoleh melalui metode lain.

Teknis Analisis Data

Menurut Sugiyono (Qomaruddin, 2024) Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data cenderung menggunakan pendekatan induktif. Artinya, proses analisis dimulai dari data yang telah dikumpulkan di lapangan, kemudian ditelusuri pola-pola hubungan yang muncul hingga membentuk suatu hipotesis sementara. Berdasarkan hipotesis tersebut, peneliti terus menggali dan mengumpulkan data tambahan secara berkesinambungan, guna menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau perlu ditolak.

Menurut Miles dan Huberman (Saleh, 2017) Dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif, peneliti perlu terlebih dahulu memahami konsep dasar dari analisis itu sendiri. Proses analisis tidak menunggu hingga seluruh data terkumpul, melainkan sudah dapat dimulai sejak awal peneliti berada di lapangan dan mulai melakukan pengamatan serta interaksi langsung dengan objek penelitian.

Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, secara umum diuraikan sebagai berikut:

Penyajian data (data display)

Proses penyajian data merupakan tahapan di mana informasi dikumpulkan dan disusun berdasarkan kategori atau klasifikasi tertentu yang relevan. Data yang disajikan dapat berbentuk narasi, visual seperti gambar, grafik, maupun tabel. Tujuan utama dari penyajian ini adalah untuk mengintegrasikan berbagai informasi agar mampu merepresentasikan kondisi atau situasi yang sedang diteliti. Oleh karena itu, untuk mempermudah peneliti dalam memahami informasi baik secara menyeluruh maupun pada bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, diperlukan penyusunan dalam bentuk naratif, matriks, atau visualisasi data lainnya yang memudahkan analisis dan interpretasi.

Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Verifikasi Data (Interprestasi Data)

Proses interpretasi data merupakan tahap untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan, yang tidak hanya berhenti pada apa yang tampak secara eksplisit, tetapi juga menelaah makna yang tersembunyi atau tersirat

di balik data tersebut. Informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif. Catatan deskriptif mencakup dokumentasi secara objektif mengenai hal-hal yang diamati, didengar, dilihat, maupun dialami langsung oleh peneliti di lapangan, tanpa campur tangan opini atau tafsir pribadi. Sementara itu, catatan reflektif berisi tanggapan, pemikiran, analisis, serta penilaian peneliti terhadap data atau temuan yang diperoleh. Catatan ini juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan untuk strategi pengumpulan data pada tahap selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan data hasil penelitian berupa wawancara dengan informan terkait sub-sub fokus yang digunakan untuk mengetahui pengawasan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh bidang Pendidikan NonFormal (PNF) dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Sub fokus yang digunakan mencakup frekuensi dan intensitas pengawasan, komunikasi, dan kerja sama. Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, masing-masing sub fokus penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :

Frekuensi dan Intensitas pengawasan

Frekuensi dan intensitas pengawasan merupakan dua aspek penting dalam proses pengawasan, di mana frekuensi pengawasan mengacu pada seberapa sering atau berapa kali kegiatan pengawasan dilakukan dalam periode waktu tertentu (seperti per minggu, per bulan, atau per tahun), sedangkan intensitas pengawasan merujuk pada tingkat kedalaman, ketelitian, dan kesungguhan dalam melakukan pengawasan, termasuk waktu yang dicurahkan, aspek yang diawasi, serta tindakan yang diambil setelah pengawasan tersebut dilakukan.

Berikut hasil wawancara dengan informan kunci (AT) selaku dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten gorontalo yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya, pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang PNF, rutin dilakukan, terutama dalam bentuk kunjungan lapangan dan evaluasi program. PKBM yang sering didampingi cenderung menunjukkan perkembangan lebih cepat, baik dari segi administrasi maupun kualitas pembelajaran”. (wawancara pada tanggal 25 juli 2025)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Frekuensi dan intensitas pengawasan yang rutin dari bidang PNF mendorong percepatan perkembangan PKBM dalam administrasi dan kualitas pembelajaran. Untuk memastikan mutu penyelenggaraan PKBM tetap terjaga dan terus meningkat melalui pendampingan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka peneliti memperdalam informasi dengan mewawancarai informan pendukung (AD) yang merupakan Kasie Saprasi Pendidikan NonFormal (PNF) yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya, kami dari bidang PNF sudah beberapa kali turun langsung ke lapangan, terutama untuk mengawasi kegiatan ujian paket yang dilaksanakan oleh PKBM. Selain itu, kami juga sering hadir saat ada undangan dari PKBM. Sampai tahun ini, kami sudah turun ke lapangan sebanyak 4 kali. Akan tetapi dalam proses

pengawasan atau kunjungan sering terjadi kendala seperti akses jalan yang kurang memadai.”(wawancara pada tanggal 11 juli 2025)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Bidang PNF telah melakukan beberapa kali kunjungan lapangan ke PKBM, terutama saat ujian paket, Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PKBM berjalan sesuai standar meskipun terkendala infrastruktur.

Kemudian menurut informan berinisial (RT) yang merupakan staf bidang Pendidikan NonFormal (PNF) mengemukakan bahwa :

“Menurut saya, kami sering melakukan pengawasan terhadap PKBM melalui kunjungan secara langsung, akan tetapi biasanya dalam kunjungan itu ada saja hambatan yang sering terjadi seperti jarak dan cuaca yang menghalangi.”
(wawancara pada tanggal 11 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengawasan terhadap PKBM dilakukan secara langsung dengan tujuan memastikan kegiatan PKBM tetap berjalan sesuai harapan, meskipun sering terkendala oleh jarak dan cuaca.

Sedangkan informan berinisial (RB) sebagai kasie peserta didik bidang Pendidikan NonFormal (PNF), saat diwawancarai mengatakan bahwa :

“Menurut saya, pengawasan dari bidang PNF cukup aktif dilakukan dengan beberapa kali kunjungan dalam setahun. Meski ada tantangan seperti akses jalan yang kurang baik, tim tetap berupaya hadir untuk memastikan kegiatan PKBM berjalan dengan baik.” (wawancara pada tanggal 11 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa Pengawasan dari bidang PNF cukup aktif Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PKBM tetap berjalan dengan baik dan sesuai standar, meski terkendala pada akses jalan.

Kemudian menurut informan berinisial (JK) yang merupakan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mengemukakan bahwa :

“Menurut saya, Bidang Pendidikan Nonformal melakukan pengawasan secara langsung Walaupun pengawasan belum bisa dilakukan terlalu sering karena keterbatasan waktu dan medan, tetapi saat dilaksanakan, kunjungan tersebut sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi pengelolaan PKBM.” (wawancara pada tanggal 23 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa Bidang Pendidikan Nonformal melakukan pengawasan secara langsung ke PKBM, meskipun frekuensinya masih terbatas karena kendala waktu dan medan yang sulit dijangkau, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan sesering yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka peneliti memperdalam informasi dengan mewawancarai informan berinisial (CR) yang merupakan pengelola PKBM mengemukakan bahwa :

“Menurut saya, pengawasan atau kunjungagan dari PNF tetap berjalan meski terdapat kendala geografis. Hal ini menunjukan dedikasi yang tinggi untuk membantu PKBM berkembang dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.” (wawancara pada tanggal 23 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dari PNF tetap dilakukan meski ada kendala geografis, menunjukkan komitmen yang tinggi

Untuk mendukung perkembangan PKBM dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka peneliti memperdalam informasi dengan mewawancarai informan berinisial (OS) selaku pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengemukakan bahwa :

“Menurut saya, pengawasan dari bidang PNF sering dilakukan, namun pada saat kondisi tertentu pengawasan yang dilakukan bidang PNF sering mendapatkan kendala seperti keadaan cuaca yang berubah-ubah (hujan, banjir, dan jalan rusak).” (wawancara pada tanggal 23 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengawasan dari bidang PNF cukup sering dilakukan Untuk memastikan kegiatan PKBM tetap berjalan dengan baik meskipun dihadapkan pada hambatan alam dan infrastruktur.

Dari hasil dengan beberapa informan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya melalui bidang Pendidikan Nonformal (PNF), secara umum telah dilakukan secara aktif dan rutin, terutama dalam bentuk kunjungan lapangan dan pendampingan kegiatan seperti ujian paket. Kunjungan ini terbukti memberikan dampak positif bagi pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan PKBM, baik dari aspek administrasi maupun pembelajaran. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti akses jalan yang rusak, kondisi geografis yang sulit dijangkau, cuaca yang tidak menentu (seperti hujan dan banjir), serta keterbatasan waktu dan sumber daya.

Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah proses penyampaian informasi, arahan, temuan, dan masukan antara pihak yang melakukan pengawasan yakni bidang Pendidikan NonFormal (PNF) dengan pihak yang diawasi yaitu pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) guna memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan, aturan, dan standar yang telah ditetapkan.

Berikut hasil wawancara dengan informan kunci (AT) dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten gorontalo yang menyatakan bahwa :

“ Menurut saya, selama ini komunikasi antara bidang PNF dan pengelola PKBM terjalin dengan baik, bisa dilihat dari program atau kegiatan seperti ujian paket dan pelatihan yang terjalin dengan baik.” (wawancara pada tanggal 25 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Komunikasi antara bidang Pendidikan Nonformal (PNF) dan pengelola PKBM berjalan dengan baik, yang tercermin dari kelancaran pelaksanaan berbagai program seperti ujian paket dan pelatihan. Hubungan komunikasi yang efektif ini menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKBM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inti tersebut peneliti memperdalam informasi dengan melakukan wawancara kepada informan yang berinisial (AD) yang merupakan Kasie Saprass Pendidikan NonFormal (PNF) yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, kami biasanya saling berkoordinasi melalui pertemuan langsung maupun media daring, tapi dalam media daring biasanya jaringan yang lambat menjadi faktor penghambat dalam berkomunikasi.” (wawancara pada tanggal 11 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Koordinasi antara PKBM dan bidang PNF umumnya dilakukan melalui pertemuan langsung maupun media daring. Kedua metode ini dinilai cukup efektif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program. Namun, dalam pelaksanaan komunikasi daring, sering kali mengalami kendala teknis seperti jaringan internet yang lambat.

Kemudian menurut informan berinisial (RT) yang merupakan staf bidang Pendidikan NonFormal (PNF) mengemukakan bahwa :

“Menurut saya, dalam setiap kegiatan, kami berusaha memberikan penjelasan yang jelas dan mendetail kepada pengelola PKBM. Respons mereka juga cukup baik, sehingga koordinasi dan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.” (wawancara pada tanggal 11 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Penjelasan yang diberikan oleh bidang PNF kepada pengelola PKBM dalam setiap kegiatan disampaikan dengan jelas dan mendetail, serta mendapat respons yang baik dari pihak PKBM. Hal ini berkontribusi pada kelancaran koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Komunikasi yang efektif dan saling memahami antara kedua pihak menjadi kunci agar setiap program atau kegiatan PKBM dapat terlaksana sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan informan berinisial (RB) sebagai kasie peserta didik bidang Pendidikan NonFormal (PNF), saat diwawancarai mengatakan bahwa :

“Menurut saya, komunikasi kami dengan pengelola PKBM cukup baik, Kami selalu terbuka dalam menyampaikan informasi kepada PKBM dan menerima masukan dari mereka.” (wawancara pada tanggal 11 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Komunikasi antara bidang PNF dan pengelola PKBM berjalan dengan baik dan terbuka. Hal ini ditunjukkan melalui penyampaian informasi yang lancar dari pihak PNF serta adanya keterbukaan untuk menerima masukan dari PKBM. Pola komunikasi dua arah ini tidak hanya memperkuat hubungan kerja yang harmonis, tetapi juga berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program-program PKBM.

Kemudian menurut informan berinisial (JK) yang merupakan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menemukan bahwa:

“Menurut saya, kami selalu berusaha aktif berkoordinasi dengan bidang PNF, dan mereka pun cukup terbuka. Meski begitu, keterbatasan jaringan di wilayah kami sering menghambat komunikasi daring, terutama saat koordinasi dilakukan melalui grup WhatsApp atau video call.” (wawancara pada tanggal 23 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Koordinasi antara pengelola PKBM dan bidang PNF selama ini berlangsung cukup baik dan terbuka, ditandai dengan adanya komunikasi yang aktif dari kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, komunikasi daring sering mengalami hambatan akibat keterbatasan jaringan di wilayah PKBM, terutama saat koordinasi dilakukan melalui grup WhatsApp atau video call.

Sedangkan informan berinisial berinisial (CR) yang merupakan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menemukan bahwa:

“Menurut saya, pihak PNF cukup responsif jika kami bertanya atau meminta petunjuk, terutama dalam pelaporan. Hanya saja, komunikasi belum berjalan secara rutin, dan

lebih sering terjadi saat mendekati pelaksanaan kegiatan.” (wawancara pada tanggal 23 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pihak PNF dinilai cukup responsif dalam memberikan petunjuk dan arahan, khususnya terkait pelaporan kegiatan PKBM. Respons cepat ini sangat membantu pengelola PKBM dalam menyesuaikan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, komunikasi yang terjalin masih belum berlangsung secara rutin, karena lebih sering terjadi menjelang pelaksanaan kegiatan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka peneliti memperdalam informasi dengan mewawancarai informan berinisial (OS) yang merupakan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menemukan bahwa:

“Menurut saya, komunikasi kami dengan bidang PNF sangat baik, dan kami juga berupaya menjalin hubungan kerja yang baik. Meskipun ada beberapa kendala seperti miskomunikasi, kami selalu berupaya untuk memperbaiki hal tersebut.” (wawancara pada tanggal 23 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Komunikasi antara pengelola PKBM dan bidang PNF berjalan dengan sangat baik, ditunjang oleh semangat kerja sama yang kuat dari kedua belah pihak. Meskipun di lapangan terdapat kendala teknis seperti keterbatasan waktu dan jarak lokasi yang cukup jauh, hal tersebut tidak mengurangi komitmen untuk tetap menjaga hubungan kerja yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara bidang Pendidikan Nonformal (PNF) dan penyelenggara PKBM secara umum telah terjalin dengan baik. Hal ini tercermin dari koordinasi yang berjalan lancar dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, seperti pelatihan serta ujian paket. Kedua pihak menunjukkan keterbukaan dan sikap saling menerima, baik dalam menyampaikan informasi maupun dalam menerima masukan dari masing-masing pihak. Respons yang diberikan oleh bidang PNF terhadap pertanyaan atau permintaan dari PKBM juga cukup cepat dan jelas, terutama dalam hal pelaporan dan pelaksanaan kegiatan. Meski demikian, komunikasi belum sepenuhnya berjalan secara rutin, karena lebih sering terjadi menjelang pelaksanaan program. Selain itu, beberapa kendala teknis masih dihadapi, seperti keterbatasan waktu, lokasi PKBM yang jauh, serta jaringan internet yang kurang stabil yang memengaruhi efektivitas komunikasi daring. Meskipun demikian, semangat kerja sama antara bidang PNF dan penyelenggara PKBM tetap terjaga dengan baik. Keduanya memiliki komitmen yang kuat untuk terus memperkuat komunikasi demi kelancaran dan peningkatan mutu pelaksanaan program-program pendidikan nonformal di tingkat masyarakat.

Kerja Sama

Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana dua pihak atau lebih saling berkontribusi dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk kolaborasi antara pihak yang terlibat seperti pengelola PKBM, dan bidang PNF, dalam rangka memastikan pelaksanaan program PKBM berjalan sesuai dengan tujuan, aturan, dan standar yang telah ditetapkan. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, keterlibatan aktif dalam proses pemantauan, serta pengambilan tindakan bersama terhadap temuan pengawasan.

Berikut hasil wawancara dengan informan kunci (AT) dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten gorontalo yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya, kerja sama antara bidang PNF dan penyelenggara PKBM terjalin dengan baik melalui koordinasi dalam pelaksanaan program. Faktor pendukung utamanya adalah komunikasi yang terbuka dan saling menghargai peran masing-masing.” (wawancara pada tanggal 25 juli 2025)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kerja sama antara bidang PNF dan PKBM terjalin baik berkat koordinasi dan komunikasi yang terbuka Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program PKBM melalui hubungan yang saling menghargai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (AD) yang merupakan Kasie Saprasi Pendidikan NonFormal (PNF) yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya, hubungan kerja sama cukup solid, terutama saat kegiatan seperti pelatihan, ujian paket, atau pelaporan. Dukungan dari dinas serta komitmen pengelola PKBM menjadi kunci utama keberhasilan kerja sama tersebut.” (wawancara pada tanggal 11 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kerja sama antara PNF dan PKBM berjalan dengan solid, berkat dukungan dari dinas serta komitmen kuat dari pengelola PKBM. Kolaborasi ini menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pelaksanaan ujian paket, dan pelaporan program, sehingga tujuan pendidikan nonformal dapat tercapai secara optimal.

Kemudian menurut informan berinisial (RT) yang merupakan staf bidang Pendidikan NonFormal (PNF) mengemukakan bahwa :

“Menurut saya, kami bidang PNF dan pengelola PKBM saling mendukung dalam merencanakan dan melaksanakan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal dimasyarakat.” (wawancara pada tanggal 11 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bidang PNF dan PKBM saling mendukung dalam perencanaan dan pelaksanaan program sebagai bentuk kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal di masyarakat. Dukungan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih efektif, relevan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan informan berinisial (RB) sebagai kasie peserta didik bidang Pendidikan NonFormal (PNF), saat diwawancarai mengatakan bahwa :

“Menurut saya, kerja sama sudah terjalin secara bersama-sama. Meski kadang ada hambatan kecil seperti waktu atau jadwal yang padat, keduanya mampu saling menyesuaikan demi kelangsungan program PKBM.” (wawancara pada tanggal 11 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kerja sama antara PNF dan PKBM sudah terjalin dengan baik, meskipun terkadang menghadapi hambatan kecil seperti keterbatasan waktu dan padatnya jadwal. Namun, kedua pihak mampu saling menyesuaikan melalui koordinasi yang fleksibel demi menjaga kelangsungan program PKBM secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara menurut informan yang berinisial (JK) selaku pengelola PKBM mengemukakan bahwa :

“Menurut saya, Kerja sama dengan bidang PNF selama ini cukup baik, karena kami sering mendapatkan arahan dan pendampingan terutama saat pelaksanaan program ujian kesetaraan. Namun, keterbatasan komunikasi terkadang membuat informasi dari dinas datang secara mendadak.” (wawancara pada tanggal 23 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kerja sama dengan bidang PNF selama ini berjalan cukup baik, ditunjukkan melalui arahan dan pendampingan yang diberikan, terutama dalam pelaksanaan program ujian kesetaraan. Namun, masih terdapat kendala dalam hal komunikasi, di mana informasi dari dinas terkadang datang secara mendadak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama sudah terjalin dengan baik, tetap diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi agar koordinasi program dapat berjalan lebih efektif dan terencana.

Berdasarkan hasil wawancara menurut informan yang berinisial (CR) selaku pengelola PKBM mengemukakan bahwa :

“Menurut saya, kerja sama ini dapat dikatakan cukup efektif, apalagi dalam perencanaan dan evaluasi program. Namun, terkadang perbedaan pemahaman terhadap kebijakan teknis sering kali yang menjadi hambatan.” (wawancara pada tanggal 23 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kerja sama antara bidang PNF dan penyelenggara PKBM berjalan cukup efektif, khususnya dalam perencanaan dan evaluasi program. Namun, agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan seragam di lapangan, masih diperlukan penyamaan persepsi dan pemahaman yang lebih intensif terkait kebijakan teknis, mengingat hambatan yang kerap muncul adalah perbedaan dalam memahami kebijakan tersebut.

Kemudian menurut Informan yang berinisial (OS) yang merupakan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat mengemukakan bahwa:

“Menurut saya, bidang PNF membantu kami dalam penyusunan laporan dan pembenahan administrasi. Hambatannya, mungkin karena banyaknya PKBM yang dibina, tindak lanjut dari pengawasan kadang tidak cepat terealisasi.” (wawancara pada tanggal 23 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bidang PNF berperan aktif dalam membantu penyelenggara PKBM, terutama dalam penyusunan laporan dan pembenahan administrasi, namun banyaknya PKBM yang dibina menyebabkan tindak lanjut hasil pengawasan tidak selalu cepat terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembinaan dari bidang PNF sangat membantu secara administratif, efektivitas tindak lanjut masih perlu ditingkatkan agar pengawasan dapat memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kinerja PKBM.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan informan, dapat disimpulkan bahwa Kerja sama antara bidang Pendidikan Nonformal (PNF) dan penyelenggara PKBM secara umum terjalin dengan baik dan berjalan cukup efektif, terutama dalam hal koordinasi pelaksanaan program, perencanaan, evaluasi, serta pendampingan kegiatan seperti pelatihan, ujian kesetaraan, dan pelaporan administrasi. Hubungan ini ditopang oleh komunikasi yang terbuka, saling menghargai peran, dan adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal di masyarakat. Namun demikian, kerja sama ini tidak lepas dari beberapa kendala, seperti perbedaan pemahaman terhadap kebijakan teknis, keterbatasan waktu, jadwal yang padat, serta komunikasi yang kadang tidak berjalan optimal sehingga informasi dari dinas kerap datang secara

mendadak. Selain itu, banyaknya PKBM yang harus dibina menyebabkan tindak lanjut hasil pengawasan tidak selalu cepat terealisasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan berikut ini mengkaji hasil penelitian terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Oleh Bidang Pendidikan NonFormal Dinas pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang dilihat dari aspek Frekuensi dan Intensitas Pengawasan, Komunikasi, dan Kerja sama.

Frekuensi dan Intensitas Pengawasan

Frekuensi dan intensitas pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Gorontalo menunjukkan adanya pelaksanaan yang belum maksimal. Pengawasan memang telah dilakukan dalam bentuk kunjungan lapangan dan pendampingan kegiatan penting, seperti pelaksanaan ujian kesetaraan. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan utama dan pendukung, pengawasan tersebut belum dijadwalkan secara rutin dan sistematis. Kunjungan umumnya dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak atau ketika ada undangan dari PKBM, bukan atas dasar jadwal berkala sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang terencana. Hambatan geografis, cuaca yang buruk, dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan utama pengawasan tidak berjalan optimal.

Dalam konteks teori manajemen Henri Fayol (Edwards, 2018, hlm.5–6), pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dalam siklus manajemen, yakni untuk memastikan bahwa segala kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. Minimnya intensitas pengawasan yang berkelanjutan akan menyebabkan lemahnya sistem kontrol, yang berdampak pada kurangnya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan potensi terjadinya penyimpangan. Selain itu, berdasarkan teori enam dimensi strategis administrasi publik oleh Yeremias Keban 2019, hlm.110–118, lemahnya dimensi kinerja dalam pengawasan menyebabkan tidak maksimalnya perbaikan mutu dan efektivitas layanan publik. Hal ini terbukti dari masih adanya PKBM yang belum memiliki data administrasi lengkap, seperti NPSN dan dokumen legal formal lainnya, serta kurangnya inovasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, intensitas dan keteraturan pengawasan perlu ditingkatkan agar keberadaan PKBM dapat memberikan layanan pendidikan nonformal yang benar-benar berkualitas dan sesuai standar nasional pendidikan.

Komunikasi

Komunikasi antara Bidang PNF dengan pengelola PKBM di Kabupaten Gorontalo masih menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi dari dinas kepada pengelola PKBM seringkali bersifat mendadak, kurang rinci, dan tidak dilengkapi dengan penjelasan teknis yang komprehensif. Beberapa pengelola PKBM mengaku bahwa mereka kerap kali merasa kebingungan dalam memahami perubahan regulasi, teknis pelaporan, maupun pelaksanaan kegiatan karena tidak adanya ruang dialog yang konsisten antara kedua belah pihak. Bahkan, tidak semua PKBM memiliki akses komunikasi yang sama cepatnya karena keterbatasan fasilitas atau minimnya penggunaan teknologi.

Dari sudut pandang teori administrasi publik oleh Chander dan Plano 1982, hlm. 70–75, komunikasi yang efektif merupakan komponen utama dalam proses implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang terstruktur dan bersifat dua arah akan memungkinkan terjadinya pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan, serta pelaksanaan teknis yang sesuai harapan. Kesenjangan komunikasi antara pengawas dan pengelola PKBM menyebabkan lemahnya pelaksanaan program, serta rentan terhadap kesalahan prosedur dan pelaporan. Hal ini juga mencerminkan lemahnya dimensi struktur organisasi seperti yang dikemukakan oleh Yermias Keban 2019, hlm. 73–80, di mana struktur birokrasi yang tidak adaptif dan kurang responsif terhadap kondisi lapangan mengakibatkan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, perlu adanya sistem komunikasi yang jelas dan berkesinambungan, misalnya melalui forum koordinasi bulanan, grup komunikasi resmi berbasis teknologi, serta SOP komunikasi yang baku agar keterhubungan antara pengawas dan pelaksana dapat terjalin secara konsisten dan fungsional.

Kerja Sama

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kerja sama antara Bidang PNF dengan pengelola PKBM telah terbentuk, namun implementasinya masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek kolaboratif yang strategis. Kerja sama umumnya terjadi saat pelaksanaan program seperti ujian kesetaraan, pelatihan tutor, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Namun, keterlibatan PKBM dalam tahap perencanaan, evaluasi kebijakan, hingga pengembangan program inovatif masih sangat terbatas. Selain itu, tindak lanjut dari hasil pengawasan juga sering mengalami keterlambatan karena banyaknya beban kerja yang diemban oleh pihak pengawas di dinas.

Menurut teori administrasi oleh Sondang P. Siagian (Risdayani Pandiangan, 2015) kerja sama merupakan bentuk koordinasi yang seharusnya menekankan prinsip saling mendukung, pembagian peran yang jelas, serta keterlibatan semua pihak dalam pencapaian tujuan bersama. Kerja sama yang hanya sebatas teknis dan prosedural akan sulit mencapai efektivitas program yang maksimal. Teori ini didukung pula oleh teori manajemen yang menyebutkan bahwa kerja sama merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian dan pengarahan. Apabila komunikasi yang mendasari kerja sama tersebut lemah, maka sinergi antar aktor pun akan terbatas, dan program pendidikan nonformal yang dilaksanakan akan cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa arahan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, ke depan perlu dikembangkan model kerja sama yang lebih terstruktur dan partisipatif, misalnya dengan melibatkan pengelola PKBM dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Nonformal Daerah, serta memperkuat forum koordinasi sebagai wadah sinergi lintas lembaga.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) terhadap penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Gorontalo telah berjalan, namun masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan lapangan, pendampingan teknis, serta evaluasi program, terutama pada saat pelaksanaan kegiatan strategis seperti ujian kesetaraan.

1. Frekuensi dan intensitas pengawasan masih tergolong terbatas karena dipengaruhi oleh kendala geografis, cuaca, keterbatasan waktu, dan jumlah personel pengawas. Meskipun

demikian, kehadiran pengawas tetap memberi kontribusi positif bagi perkembangan administrasi dan mutu layanan pendidikan di PKBM.

2. Dalam aspek komunikasi, hubungan antara bidang PNF dan pengelola PKBM telah terbentuk, namun belum maksimal. Sering kali terjadi ketidaksinkronan informasi atau komunikasi mendadak, yang berdampak pada kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Kerja sama antara kedua pihak dapat dikatakan cukup baik, ditandai dengan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Namun, kerja sama tersebut masih menghadapi hambatan, seperti perbedaan pemahaman terhadap kebijakan teknis, serta keterbatasan waktu dan sumber daya.
4. Secara keseluruhan, pengawasan oleh bidang PNF berperan penting dalam menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu PKBM. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam sistem pengawasan, komunikasi, dan kerja sama agar pelaksanaan pendidikan nonformal dapat berjalan lebih optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti menarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Dinas pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang PNF disarankan untuk menjadwalkan pengawasan secara berkala dengan sistem rotasi yang merata agar seluruh PKBM mendapat pendampingan yang seimbang. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi mutu dan ketercapaian tujuan program.
2. Dibutuhkan mekanisme komunikasi yang lebih terbuka, responsif, dan terjadwal antara dinas dan PKBM, baik melalui pertemuan rutin, grup koordinasi daring, maupun penyusunan jadwal kegiatan bersama agar tidak terjadi miskomunikasi.
3. Penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis perlu dilakukan secara berkala agar tenaga pengawas dan pengelola PKBM dapat memahami regulasi, metode pengawasan, dan inovasi pembelajaran yang relevan.
4. Secara keseluruhan, perbaikan dalam aspek pengawasan, komunikasi, dan peningkatan kapasitas akan saling mendukung dalam menciptakan ekosistem pendidikan nonformal yang lebih berkualitas, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kebutuhan lokal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2020). *Management Control Systems*.

Daft, R. L. (2021). *Management*.

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. (2021). *No Title* (1st ed.). CV. syakir Media Press.

Fakiha, K. (2021). Pengertian Manajemen Dari Berbagai Segi Menurut Ahli dan 4 Fungsi. In *Detikedu*.

Hakim, I. A., Waty, E. R., Husin, A., & . S. (2020). Studi Implementasi Standar Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Di Sumatera Selatan. In *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah* (Vol. 3, Issue 1, p. 181). <https://doi.org/10.32832/oborpenmas.v3i1.2981>

Hoerniasih, N. (2017). Faktor Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Bina Sejahtera" Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA*, 125–133.

Irmawati, A.-. (2017). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Dalam Mengurangi

- Buta Aksara Di Kabupaten Karimun*). In *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (Vol. 2, Issue 1, pp. 81–98). <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.579>
- Jones, G. R., & George, J. M. (2018). *Contemporary Management*.
- Koontz, H., & Weihrich, H. (2016). *Essentials of Management*.
- Mariska, S., & Sukiyah, S. (2023). Penerapan Teori Manajemen Henry Fayol Untuk Menjalankan Bisnis. *MANTRA (Jurnal Manajemen Strategis)*, 1(1), 1–8.
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18.
- Muliyah, P. (2020). Fungsi Perencanaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Di Sub Bagian Penatausahaan Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Jawa Barat. *Journal Geej*, 7(2), 13–21.
- Nanda, S. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif_ Pengertian, Jenis, & Contoh*. Brain Academy.
- Putri, R. A., Setyoko, P. I., & Indiahono, D. (2022). Ratio Legis Grand Design Reformasi Birokrasi: Upaya Perbaikan Dimensi Administrasi Publik dari Masa ke Masa. In *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* (Vol. 8, Issue 2). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i2.5696>
- Qomaruddin, H. S. (2024). (PDF) *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif_ Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*.
- Risdayani Pandiangan. (2015). (PDF) *pengertian administrasi menurut para ahli*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2020). *Management*.
- Saleh, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 1, 180.
- Si Manis. (2023). Pengertian Pengawasan, Tujuan, Manfaat, Fungsi, Dan Jenis Pengawasan Menurut Para Ahli Lengkap. In <https://Www.Pelajaran.Co.Id/Pengertian-Tujuan-Manfaat-Fungsi-Dan-Jenis-Pengawasan-Menurut-Para-Ahli/>.
- Siagian, S. P. (2016). *Filsafat Administrasi*.
- Sry Arlina, E. (2020). Penataan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 8(3), 9414–9427.
- Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (2019). *Management*.
- Suryadi. (2019). *Pengawasan Pendidikan Nonformal dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional*.
- Sutikno. (2021). *Peran Strategis Pendidikan Nonformal dalam Pembangunan SDM*.
- Veronika. (2021). Pengertian Administrasi Publik: Sifat, Ruang Lingkup, Fungsi, Tujuan, dan Teorinya. In *Gramedia*.
- Wiyani, N. A. (2020). *Manajemen PKBM dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Nonformal*.
- YANI, P. (2023). Peran Pendidikan Nonformal Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Agama Siswa (Studi Kasus Di Smp Nasional Plus Pelita Insani. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Viii(I), 1–19.